

**MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA: *STUDI KASUS PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA MEKKATTA, KABUPATEN MAJENE***

**Rahmayandi Mulda<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>, Meri Enita Puspita Sari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*rahmayandim@yahoo.co.id*

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*nurhayati@fisip.unrika.ac.id*

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

*puspita.meri@yahoo.co.id*

**Abstrak**

Manajemen sangat dibutuhkan dalam segala hal, utamanya dalam pengelolaan pemerintahan Desa, Desa memiliki banyak persoalan mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan desa dan lain-lain, dengan adanya manajemen pemerintahan desa yang baik diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada didesa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti mengobservasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan pengkajian dan analisis mendalam terhadap data yang ditemukan dilapangan yang akan dituangkan dalam tulisan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan, hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada di pedesaan, utamanya pola pikir masyarakat desa. Sumber daya alam yang melimpah dan pendanaan yang cukup tidak akan mampu mendorong masyarakat lebih sejahtera, jika sumber daya manusia dalam mengelola potensi tersebut mengalami keterbatasan.

Kata Kunci: Manajemen, Pemerintahan, Desa.

**Abstrack**

*Management is mostly needed in all sides. The first one is in organizing village administration. Village has many problems started from natural recourses, human recouses, financil recouses atc. By having a good village administration, it is hoped to becom a good solution to solve problems in the village. Reseach method used in this research was Qualitative research Method where the researcher directly observed the research object by conducting a deep inspection and analysis to the founded data in the research field to the descriptive research. This reseach finding showed that in improving village human prosperity, the first thing to do by the researcher was solving human resources in the village and human mindset prominently. Most natural and enough financial resources would not support human more prosperously if human resouces in managing that potencial got limitaions.*

*Keywords: Management, Government, Village.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan studi manajemen menjadi objek perhatian banyak pihak dalam masa perubahan yang cepat seperti dan tidak pasti (*unpredictable*) seperti saat ini. Setiap organisasi baik publik maupun privat diperhadapkan pada gejolak tuntutan yang beragam, sehingga perubahan pada proses manajemen organisasi sebagai bentuk adaptasi dan pemenuhan kebutuhan adalah suatu keniscayaan bagi sebuah organisasi. Pengkajian manajemen kemudian bukan saja menjadi konsumsi para akademisi dalam ranah teoritisasi saja namun mulai merambah pada ranah yang lebih praktis yakni pada sektor pemerintahan, perusahaan swasta hingga pengelolaan organisasi formal maupun informal. Salah satu cabang manajemen populer adalah manajemen sumber daya manusia dan manajemen kinerja. Pengembangan cabang ilmu manajemen tersebut kemudian menjadi bagian penting dari kebutuhan organisasi baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta atau perusahaan. Siagian (2008) mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini tampak suatu *fenomenon administrative* pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya, yaitu semakin besarnya perhatian banyak pihak terhadap pentingnya manajemen sumber daya manusia.

Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana desa yang dikenal dengan minimnya kepemilikan sumberdaya manusia yang juga berkorelasi dengan minimnya kinerja masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tentunya hal ini menjadi menarik ketika dikonseptualisasikan pada proses manajemen pemerintahan desa saat ini, karenanya penelitian ini berusaha mendudukan konsep manajemen sumber daya manusia dan konsep manajemen kinerja sebagai sebuah topik yang saling mengisi dalam proses manajemen pemerintah desa atau boleh dikatakan antara *input* dan *output*.

Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas, biasanya budaya lokal menjadi identitas khusus bagi desa. Karenanya desa lebih tercirikan pada adanya budaya lokal yang menjadi dasar interaksi masyarakat desa. Selain itu, sebagian besar penduduknya hidup bergantung pada keadaan sumberdaya alam wilayahnya. Karena itu desa dicirikan oleh pekerjaan masyarakat yang dominan disektor primer misalnya pertanian dan perikanan yang secara khusus diklasifikasikan meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Karenanya, desa dikenal dengan tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, derajat kesehatan, ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan daerah

perkotaan (Adisasmita, 2006). Kompleksnya masalah di desa bukan karena desa tidak memiliki potensi apapun untuk berkembang, namun bisa jadi karena manajemen pemerintahan desa yang buruk. Karena itu dibutuhkan suatu manajemen pemerintahan desa yang baik.

Manajemen pemerintah desa sepertinya belum berjalan dengan baik hal ini dapat kita temui bahwa desa masih diidentikkan dengan kemiskinan dan kurangnya sumberdaya, seperti yang diungkapkan oleh Wasistiono & Tahir, (2006) bahwa Selama ini kawasan pedesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan pemukiman pedesaan. Hal senada juga diungkapkan oleh Adisasmita (2006) bahwa pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya bekerja di sektor pertanian dan nelayan namun kehidupan mereka cukup memprihatinkan.

Jika dilihat lebih dalam, desa sebenarnya memiliki banyak potensi utamanya sumberdaya alam, namun pengelolaan yang belum maksimal dengan baik menjadikan potensi tersebut belum bisa mensejahterakan masyarakatnya. Daya dukung pemerintah daerah dalam posisinya memiliki kekuatan untuk memberdayakan potensi desa diperlukan, disamping adanya partisipasi aktif masyarakat desa itu sendiri. Pada kondisi ini kita bisa mendudukan ranah regulasi dan implementasi sebagai suatu yang mesti berjalan beriringan dalam menyikapi berbagai persoalan didesa. Artinya, ranah birokrasi dan masyarakat perlu saling mendukung dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perkembangannya saat ini, desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki kerangka acuan normatif yang kemudian memberi wadah pada adanya inisiatif lokal, dengan begitu pemerintah dan masyarakat desa mampu mengelola modal sosial mereka dalam mencapai berbagai kebutuhan masyarakat desa secara umum. Namun kondisi ini kembali diperhadapkan oleh sumberdaya manusia yang akan mengelola sejumlah kerangka aturan yang diberikan tersebut.

Apalagi kita tahu bahwa dalam amanat Menurut PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah memiliki kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui oleh pemerintah, serta batas-batas wilayah yang kewenangannya diserahkan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan untuk kemandirian desa terus diembuskan sebagai bentuk keberpihakan pada adanya entitas lokal dalam struktur otonomi daerah saat ini, kekuatan negeri ini dipercaya dimulai dari desa karena itu sejumlah kerangka regulasi terus dilahirkan untuk memberi dukungan kepada desa dan entitas didalamnya.

Regulasi dan dukungan keuangan yang cukup besar tersebut dapat menjadi jalan tengah antar persoalan yang ada didesa, hal itu masih memerlukan diskusi dan sejumlah pengkajian lebih lanjut. Penelitian ini kemudian, mencoba mengkerangkakan sejumlah potensi desa dan persoalan yang ada didalamnya pada konteks sejumlah amanata Undang-Undang desa tersebut. Betapapun demikian, pengkajian ini bukan dimaksudkan sebagai assesment untuk menggeneralisasikan dampak yang memungkinkan muncul dalam manajemen pemerintahan desa oleh karena aturan tersebut. Penelitian ini hanya terbatas pada pengkajian yang dilakukan pada tingkatan lokal di masyarakat desa Mekatta provinsi Sulawesi Barat.

Ketertarikan penelitian ini karena Desa Mekatta Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, karena pada daerah ini dipercaya masih terpeliharanya sejumlah budaya lokal yang kemudian menjadi dasar interaksi masyarakat. Karena itu, proses sosial tersebut juga akan berpengaruh pada perlakuan dan perumusan manajemen pemerintahan desa. Disamping itu, Desa Mekatta memiliki potensi sumber daya alam yang cukup potensial, untuk kemudian dikelola melalui manajemen pemerintahan desa bagi kesejahteraan masyarakat desa mekatta. Maka dari itu, permasalahan penelitian adalah bagaimana manajemen pemerintahan Desa Mekatta Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

## **METODELOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk kemudian mampu mengungkapkan dan menggambarkan fenomena penelitian secara lebih terperinci dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung kepada sejumlah stakeholder dan masyarakat di Desa Mekatta Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Pada gilirannya dalam penyajian hasil penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan

tujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu.

## PEMBAHASAN

### **Karakteristik Masyarakat Desa Mekkatta**

Desa Mekkatta memiliki beberapa potensi, baik berupa potensi Sumber Daya Alam maupun potensi yang lahir dari ciptaan dan hasil usaha manusia. Sumber Daya alam di Desa Mekkatta merupakan salah satu potensi Alami terbesar yang apabila dapat dikelola secara maksimal akan dapat memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Sumber daya alam itu dapat berupa: hutan luas, kayu, tambang, sungai, tanah subur untuk pertanian/perkebunan dan laut dan tambak sebagai lahan perikanan.

Sedangkan potensi yang lahir dari buatan manusia adalah hasil dari Pembangunan yang selama ini telah diprogramkan, baik oleh Pemerintah maupun atas swadaya dan prakarsa masyarakat. Potensi itu dapat berupa, Kantor Pemerintah, Sarana/Prasarana pendidikan, kesehatan, keagamaan, jalan/jembatan dan lain-lain. Hal lain yang merupakan potensi atas usaha manusia adalah Sumber Daya Manusia, walaupun bila diukur dari tingkat pendidikan masih sangat terbatas jumlahnya tetapi dampaknya sudah dirasakan oleh warga Desa Mekkatta. Potensi lain yang lahir dan berkembang secara alamiah di masyarakat Desa Mekkatta adalah budaya gotong royong yang diwujudkan dalam semangat berkelompok yang juga salah satu potensi dasar yang tidak bisa diukur dengan materi.

Budaya gotong royong tersebut berhadapan dengan realitas kepentingan politik didaerah. Dimana kondisi serius yang dialami oleh masyarakat pedesaan adalah semakin renggangnya hubungan kekerabatan dan pergaulan sosial akibat dari demokrasi pemilihan secara langsung, baik pemilihan kepala daerah, kepala desa, maupun pemilihan anggota DPRD. Masyarakat desa kemudian digiring pada kelompok-kelompok kecil sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon, yang pada gilirannya membagn friksi antar komunitas masyarakat di desa Mekkatta.

Kondisi sosial masyarakat desa yang terbagi menjadi kelompok-kelompok social tertentu yang biasanya berlatar pada streatip pribumi dan pendatang. Bangunan kelompok-kelompok ini tentu memperlemah kerjasama masyarakat dalam skala komunitas, berbagai kepentingan kelompok tentu akan menjadi sulit teridentifikasi oleh adanya kelompok-

kelompok tersebut. Hal ini tentu berkorelasi dengan manajemen pemerintahan desa mekkatta yang masih memelihara adanya musyawarah mufakat, karena secara tidak langsung akan ada kelompok yang mendominasi dan didominasi dalam ranah kebijakan publik di komunitas. Kondisi jelas terjadi karena tidak memungkinkan kemudian semua kepentingan berbagai kelompok tersebut menjadi satu kebijakan bersama dalam musyawarah.

Kondisi sumber daya manusia Desa Mekkatta, menurut pendidikan secara umum menurut terbilang rendah, sesuai dengan pendataan tahun 2009 yang lalu bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun keatas tercatat sebanyak 284 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dari jumlah Penduduk 2.416 jiwa. Dengan kondisi seperti ini, tentu menjadi salah satu program kerja yang mesti dipecahkan pemerintah desa untuk kemudian bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakatnya.

Sebagian besar masyarakat Desa Mekkatta masih menggantungkan hidupnya dibidang pertanian/perkebunan sebagai sumber pencaharian mereka. Sedangkan sebagian lainnya ada yang bergerak dibidang jasa, Pegawai Negeri sipil, nelayan dan lain-lain. Umumnya pekerjaan masyarakat sebagai petani tersebut terbilang masih minim dalam penggunaan teknologi tepat guna, sehingga hal ini ikut mempengaruhi pendapatan masyarakat desa. Kondisi ekonomi Masyarakat Desa Mekkatta dari tahun ketahun cukup mengalami perubahan yang positif serta kesejahteraan masyarakat mulai meningkat. Namun masih ditemukan beberapa kendala teknis, diantara pemanfaatan pasar desa yang belum maksimal, selain itu pola pikir (*mindset*) masyarakat yang cenderung konsumtif menjadikan masyarakat cukup sensitif pada berbagai aspek yang berkaitan pada ranah ekonomi.

Telah diuraikan bahwa ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Desa Mekkatta juga terdapat beberapa kendala dan masalah yang berhadapan dengan manajemen pemerintah desa. Diantaranya bila dilihat dari faktor ekonomi yakni tingkat kemiskinan masyarakat yang cukup besar dibandingkan dengan rasio penduduk secara keseluruhan. Di Desa Mekkatta menurut data BKKBN (tahun 2013), jumlah Keluarga Sejahtera I (S-I) sebanyak 276 KK dan Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) sebanyak 114 KK.

Karakteristik masyarakat Desa Mekkatta tidak jauh berbeda dengan masyarakat desa lainnya di Sulawesi Barat. Kemiskinan masih menjadi pemahaman jamak terhadap kondisi masyarakat desa di Sulawesi Barat, karena itu desa mekkatta senantiasa mendapatkan bantuan oleh karena adanya program pemberdayaan oleh pemerintah daerah. Disamping itu, masalah kemiskinan juga tidak dapat dipisahkan dengan keadaan ekonomi masyarakat.

Dalam pengertian disini adalah hasil produksi pertanian dan perkebunan masyarakat yang belum memiliki pasar yang kompetitif, dukungan sarana dan prasarana, serta transportasi sehingga pasar, kualitas dan harga hasil produksi kakao petani masih rendah. Pada gilirannya, minimnya sumberdaya manusia yang kemudian berkorelasi dengan belum adanya pasar hasil produksi pertanian masyarakat, menjadikan masyarakat Desa Mekkatta belum memiliki *bargaining power* dalam melakukan relasi maupun tawar menawar harga produksi pertanian masyarakat. Betapapun demikian, kehadiran pemerintahan desa perlu memberi fokus pada kondisi tersebut dan melalui perencanaan yang baik akan memberi secercah harapan untuk itu.

### **Dinamika Perencanaan Pemerintahan Desa**

Dalam konteks masyarakat Desa Mekkatta, bahwa dalam struktur sosial masyarakat kemudian terbentuk kelompok-kelompok kecil. Sehingga hal ini menuntut berbagai kepentingan kelompok masyarakat tersebut untuk dapat diakomodasi dengan baik, adil dan berpihak pada masyarakat membutuhkan. Karena itu proses ini membutuhkan perencanaan yang baik, dalam konsep manajemen organisasi perencanaan menjadi proses yang penting dalam menentukan program maupun kebijakan publik di desa.

Dalam mewujudkan amanat tersebut Pemerintah Desa Mekkatta membuat perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tersebut harus mengikut sertakan seluruh aparat desa, kepala desa dan anggota BPD serta anggota masyarakat. Kondisi mensiratkan bahwa sekalipun apa yang dijalankan tersebut adalah bagian dari formalisasi organisasi pemerintah Desa Mekkatta, namun pada pelaksanaannya lebih didasarkan pada mekanisme yang informal. Dalam artian bahwa proses perencanaan dilakukan secara kolektif dalam musyawarah desa, lebih terbuka serta mengedepankan pada kebaikan bersama.

Penetapan perencanaan pembangunan desa merupakan kesepakatan semua perangkat desa dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan tersebut betul-betul sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat desa. Dalam musyawarah perencanaan kinerja pemerintah Desa Mekkatta biasanya mengalami perdebatan yang cukup panjang, hal ini memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam memperjuangkan kepentingannya di tingkatan desa. Perdebatan di tingkat desa dalam

menyusun rencana pembangunan desa kadang-kadang diwarnai dengan sikap emosional dari anggota BPD maupun masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mengamanatkan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Selain itu melalui perencanaan pemerintahan desa akan dapat membantu berpikir dan bertindak dalam menjalankan proses pembangunan dalam wilayah pedesaan.

Dalam menghadapi perubahan sosial yang terus terjadi dalam masyarakat pedesaan, pemerintah Desa Mekkatta terus berpikir strategis untuk bisa mengarahkan masyarakatnya menuju masyarakat desa yang maju dan mandiri, selain itu pemerintah desa terus mengembangkan kapasitasnya dalam menanggulangi lingkungannya yang terus berubah, dan pemerintah desa terus mengembangkan potensi desa sehingga mampu bertahan dalam menghadapi perubahan.

Pemerintah Desa Mekkatta selalu memfokuskan kinerjanya pada kegiatan organisasi desa dan berfikir apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kinerja organisasi perangkat desa, namun mereka terkendala pada persoalan yang klasik seperti keuangan dan sumber daya manusia seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Mekkatta:

Ada beberapa Aspek manajemen perencanaan pembangunan Desa Mekkatta yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2011-2015, aspek manajemen perencanaan tersebut meliputi visi, misi, strategi pencapaian tujuan, Kebijakan pemerintah desa, Prosedur pelaksanaan kegiatan, Program kerja serta penganggaran program kerja.

Visi merupakan harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat Mekkatta, adalah; Terwujudnya Masyarakat Desa Mekkatta yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Namun kembali lagi bahwa, visi hanya akan menjadi angan-angan jika kemudian tidak didukung oleh masyarakat dan setiap stakeholder yang ada di Desa Mekkatta. Dalam amatan peneliti, menemukan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal pada beberapa bagian, sehingga masih adanya program yang mapan dalam wacana konsep namun minim dalam ranah konseptualisasinya. Mencermati hal ini, memang tidak sepenuhnya menjadi permasalahan dalam perencanaan program saja yang kemudian menjadi tumbal stagnansi pembangunan desa, pengalaman keberhasilan dan kegagalan yang diproduksi masyarakat desa mekkatta juga perlu disikapi dengan pihak stakeholder desa yang perlu berkaca pada seberapa besar dukungan yang diberikan mereka.

Jika menelusuri pada Alokasi Dana Desa (ADD) disetiap tahunnya, Desa Mekkatta diberikan kewenangan keuangan sebesar Rp. 228.668.025,71. Dana ini tentu bukan nilai yang kecil jika kemudian mampu dikelola dengan baik oleh perangkat pemerintahan desa yang pada akhirnya mampu memberi pendapatan bagi daerah. Realitanya peneliti menemukan bahwa dengan anggaran sebesar itu, hanya bisa menyelesaikan satu program desa setiap tahunnya. Kondisi ini kemudian menyiratkan bahwa perencanaan program juga memerlukan adanya pengorganisasian masyarakat yang kompeten untuk bisa ikut terlibat atau setidaknya memberi dukungan bagi implementasi program pembangunan di desa mekkatta.

### **Proses Organisasi Pemerintahan Desa**

Pengorganisasian merupakan suatu proses dimana pekerjaan diatur dan dibagikan kepada anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Dalam pengorganisasian kegiatan pemerintah desa (kepala desa) mengkoordinir sumberdaya yang ada dan membagikan tugas pada perangkat desa agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang efisien dan efektif. Konteks ini dipahami bahwa kepala desa berusaha menjalankan layanan untuk semua anggota masyarakatnya.

Pemerintah Desa Mekkatta telah mencoba mendesain sebuah organisasi perangkat desa sehingga proses pengorganisasian dalam hal ini proses manajemen pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Pengorganisasian disini kemudian tidak terbatas hanya pada organisasi pemerintah daerah, namun pada mekanisme artikulasi kepentingan kolektif masyarakat desa mekkatta serta implementasi berbagai kesepakatan kolektif masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat desa mekkatta dilakukan dengan menyesuaikan struktur pemerintahan desa, dengan tujuan pembangunan desa yang memperhatikan sumberdaya yang dimiliki oleh desa sehingga proses pembangunan desa dapat terukur dengan baik. Konteks ini dipahami bahwa pemerintah desa mekkatta lebih mengedepankan keadaan sumberdaya desa ketimbang memaksakan aturan yang ada tentang manajemen pemerintahan desa. Artinya masyarakat kemudian mampu membuat aturan (norma) kolektif bersama untuk mengatur dan mengorganisasikan masyarakat. dengan metode seperti ini tentu akan lebih membangun kerjasama (*collective action*) masyarakat, karena merasa memiliki andil dalam membuat konsesus skala pemerintah desa.

Masyarakat Desa Mekkatta menghadapi kondisi pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang belum maksimal untuk menggerakkan pembangunan desa. Pemerintah

desa menghadapi kondisi tersebut dengan memanfaatkan sumberdaya manusia di desa, dan tidak terlalu membutuhkan tenaga profesional serta mengkondisikannya dengan keadaan keuangan pemerintah desa. Namun, kondisi ini tidak serta merta mampu membantu pembangunan yang cukup signifikan karena memang sumberdaya untuk itu cukup terbatas, praktis peneliti menemukan bahwa seringkali kuantitas pembangunan desa cukup minim bahkan dalam satu tahun hanya satu program yang terlaksana. Adapun beberapa contoh kegiatan yang sudah dilakukan adalah perbaikan jalan atau jembatan desa, pengadaan mesin diesel untuk dusun yang belum memiliki listrik dari PLN, dan pengadaan kelengkapan alat-alat kantor.

### **Peran Pemimpin dalam Pemerintah Desa Mekkatta**

Peran pemimpin sangat penting bukan saja dalam mengelola organisasi perangkat pemerintah daerah, namun juga mengatur masyarakat dan menangani konflik yang terjadi di masyarakat desa. Konflik kepentingan antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya, kepala desa sebagai pimpinan di wilayah pedesaan idealnya berada pada posisi yang netral, tidak memihak pada satu kelompok masyarakat tertentu. Meskipun awalnya kepala desa secara dominan dipilih oleh kelompok tertentu namun ketika berada dalam struktur pemerintahan desa, seorang kepala desa harus bisa memberi kepuasan kepada semua kelompok masyarakat.

Kepala Desa Mekkatta memiliki kewenangan dalam memutuskan program kerja pembangunan desa hanya sebagai fasilitator. Seringkali berbagai inovasi dikemukakan oleh kepala desa, namun kembali lagi bahwa kesepakatan mengenai realisasi inovasi tersebut dilakukan secara kolektif. Dalam amatan peneliti, mengamati ada pertentangan ide di masyarakat desa bahwa inovasi kepala desa yang lebih mengharapkan adanya kemandirian masyarakat, sehingga inovasi dilakukan untuk membangun kapasitas masyarakat desa. Sedangkan pola pikir masyarakat desa yang lebih menghadapi program pembangunan fisik (kelihatan bentuknya) dengan jangka pendek ketimbang pada pembangunan kapasitas masyarakat untuk jangka panjang. Pada gilirannya kepala desa harus mengalah dengan kesepakatan kolektif.

Hal ini dapat memberikan pemahaman bahwa kepala desa membangun kondisi yang demokratis dengan mengedepankan pelayanan untuk semua, sehingga apa yang menjadi kesepakatan kolektif menjadi program kerja Desa Mekkatta. Hanya saja, kondisi ini juga dapat

dilihat sebagai bentuk lemahnya kepemimpinan kepala desa untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sesuatu yang lebih memiliki efek jangka panjang. Pada gilirannya kondisi ini dilihat dari peran pemimpin atau kepala desa, belum memperlihatkan bahwa organisasi pemerintah desa menjadi sarana pembelajaran masyarakat desa (*learning organisation*) untuk kemudian masyarakat desa mampu memahami setiap kemungkinan perubahan yang terjadi dikemudian hari (Eko, 2011). Padahal jika kemudian forum-forum warga seperti itu mampu menjadi sarana pengembangan kapasitas masyarakat desa sebagai jalan pemberdayaan masyarakat, dan tentu peran pemimpin masyarakat (kepala desa) menjadi penting dalam memahami kondisi itu (Soetomo, 2013).

Salah satu kecakapan dalam kepemimpinan adalah memiliki *Human Skills* yakni seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memahami orang lain, bekerjasama dengan orang lain, mendorong serta memotivasi orang lain, baik secara individual maupun kelompok. karena proses organisasional masyarakat desa yang dilakukan melalui pendekatan musyawarah mufakat maka dialog adalah hal utama yang dikedepankan dalam poses Kepemimpinan Kepala Desa Mekkatta.

Dalam menjalankan proses pemerintahan di wilayah Desa Mekkatta dinilai cukup dekat dengan para aparat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pola pendekatan yang dilakukan dengan kepala desa yakni melakukan komunikasi secara intensif kepada masyarakat maupun aparat desa. Melalui proses komunikasi tersebut kepala desa mempelajari, mengajak bekerja sama dan memberi motivasi kepada setiap orang yang dia temui.

Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Kepala Desa Mekkatta yakni kemampuan memahami serta melakukan kegiatan operasional (*Technical Skills*) dalam melakukan beberapa kegiatan. Kepala Desa Mekkatta memiliki latar belakang sebagai pengusaha sekaligus sebagai salah satu tokoh masyarakat menjadi dasar kemampuan manajerial dan kewibawaan di mata masyarakat desa. Seorang kepala desa harus jujur, visioner, dan inovatif dalam mendorong kemajuan desa, sebagai Kepala Desa Mekkatta memiliki visi untuk mengembangkan dan memajukan Desa Mekkatta menjadi desa yang mandiri. Desa mandiri yang ingin digagas oleh pemerintah Desa Mekkatta adalah melakukan pembenahan manajemen pengelolaan pasar desa sehingga retribusi pasar desa bisa berjalan dengan baik.

Program kerja yang saat ini sedang diinisiasi Pemerintah Desa Mekkatta adalah dalam pengelolaan pasar desa. Pemerintah desa mengidentifikasi bahwa pasar yang desa sepi,

kurang pedangan dan pembeli, hanya berlangsung pada hari rabu pagi sampai siang. Rencananya pemerintah desa, pasar ini akan dijadikan pasar malam dengan tujuan sebagai wisata kuliner di pasar desa sehingga bisa menarik simapati masyarakat setempat maupun masyarakat diluar Desa Mekkatta. Selain itu program kerja yang lain yang ingin dilaksanakan Pemerintah Desa Mekkatta dalam mendorong kemandirian Desa Mekkatta adalah pemamfaatan tanah desa, awalnya tanah desa tersebut merupakan lahan tidur rencananya pemerintah desa akan memanfaatkan tanah tersebut menjadi lahan produktif yang akan nantinya ditanami tanaman jangka pendek dan dijadikan lahan peternakan sapi dan hasilnya akan menjadi pendapatan asli desa.

### **Analisis Manajemen Pemerintah Desa Mekkatta**

Sebelumnya telah dipaparkan mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan Desa Mekkatta dan dinamika yang terjadi didalamnya secara konseptual. Namun seyogyanya pembahasan ini juga dapat dilihat pada sisi regulasinya melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dapat dipahami posisi pemerintah Desa Mekkatta terhadap regulasi yang ada, untuk kemudian dapat menjadi masukan dalam menyikapi berbagai kondisi yang ada di Pemerintah Desa Mekkatta dimasa yang akan datang.

Dari penjelasan sebelumnya memberikan pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mekkatta, dilakukan dengan mengedepankan kemandirian dalam menentukan program kerja melalui musyawarah mufakat (*self governing*), sekalipun kemudian pemerintah desa diperhadapkan oleh kurang dukungan sumberdaya dalam proses implementasinya. Masih hangatya diskusi mengenai pembaruan perundangan-undangan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang cukup potensial untuk pemerintah desa mengembangkan masyarakatnya dengan tidak meninggalkan adat budaya lokal desa.

Perkembangan positif dari regulasi mengenai desa dapat ditinjau dari perubahan perundang-undangan yang ada. Tentu ini akan memberikan posisi strategis Desa Mekkatta dalam melakukan berbagai inovasi dalam pemerintahan desanya. Hanya saja banyak hal yang perlu diperhatikan sebelumnya misalnya pada pengawasan dan pembinaan masyarakat desa. Adanya perubahan perundang-undangan desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 saat ini disatu sisi membangun relasi desa dengan pemerintah pusat karena mulai dari anggaran dan pembinaan masyarakat desa, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan itu.

Disisi lain, hal itu menyangkut aspek keuangan atau pembiayaan pembangunan yang disaat ini desa memiliki alokasi dana dari APBN.

Bahkan untuk bantuan keuangan tersebut terbilang cukup besar dimana dalam setiap tahun desa bisa mengantongi hingga 1,2 milyar rupiah (detik.com, Januari 2014). Namun pada konteks Desa Mekkatta dan beberapa kelemahannya, keadaan ini dapat menjadi alat (*tools*) pemerintah desa untuk mampu berkembang atau malah sebaliknya keadaan tersebut menjadi bumerang bagi pemerintah dan masyarakat Desa Mekkatta. Karena dana dan kewenangan yang besar tanpa akuntabilitas akan menjerumuskan desa dan aparatnya pada perilaku korupsi (Muluk, 2008).

Selain itu pada ranah birokrasi pemerintah desa yang dikenal dengan nuasanya yang bersifat personal sehingga pengawasan memang masih menjadi hal yang sangat problematik di desa. Undang-Undang yang baru ini dimana dengan membandingkan PP 72 tahun 2005 dengan UU nomor 6 tahun 2014, telah terlihat jelas bahwa pada PP 72 tahun 2005, pengawasan hanya wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan camat sedangkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak wajib melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Realitanya kemudian kita tidak bisa menutup mata pada kemungkinan pemerintah desa menjadi bermuka dua pada proses birokratisnya. Dimana pada satu sisi pemerintah desa karena memiliki keterikat dengan pemerintah di atasnya mengesankan pemerintah desa sebagai unit yang berwajah impersonal sebagai bentuk pertanggungjawabannya, namun pada sisi lain interaksi pemerintah desa dengan masyarakat desa tetap ingin mempertahankan nuasa personal dalam relasi sosial di desa (Purwosantoso, 2002).

Konteks Manajemen Pemerintah Desa Mekkatta memang masih membutuhkan pembinaan intensif dari pemerintah di atasnya. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 inipun kemudian mengatur hal tersebut dimana pasal 112 ayat 1 dan 2, menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pengawasan dan pembinaan tersebut dapat didelegasikan kepada kepada perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa Mekkatta yang kemudian akan diperhadapkan dengan pola pengawasan dan pembinaan seperti disebutkan di atas, tentu kemudian tidak serta merta menjadikan proses penyelenggaraan pemerintah desa menjadi efektif. Beberapa hal yang menjadi kelemahan di desa mekkatta misalnya sumberdaya

manusia, mungkin akan memerlukan pembinaan oleh pihak eksternal komunitas masyarakat desa mekkatta dalam hal ini pemerintah daerah di atasnya. Namun akan berbeda dengan kondisi modal sosial yang tumbuh dan berkembangnya dipengaruhi budaya lokal setempat, karena menurut amatan peneliti hal ini tanpa adanya dukungan pemerintah daerah dalam membangun kerjasama (*linkage*) terlebih dahulu dengan masyarakat desa mekkatta, maka bentuk pengawasan maupun pembinaan itu akan menimbulkan resistensi yang pada gilirannya dapat membangun *distrust* masyarakat pedesaan kepada pemerintah daerah di atasnya.

Pada sisi Kepala Desa secara personal pertanggung jawabannya dilakukan langsung kepada masyarakat desa. Selain itu, secara organisasional tentunya kepala desa juga bertanggung jawab kepada struktur pemerintahan yang berada di atasnya. Kepala desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam system pemerintahan desa, wajib mengawasi para aparat desa yang lain, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat desa.

Konteks Kepada Desa Mekkatta, pola pengawasan yang dijalankan oleh kepala desa melalui pengawasan langsung. Seperti misalnya setiap ada kegiatan atau program kerja kepala desa ikut terlibat langsung didalamnya. Ketika ditemukan adanya penyimpangan dalam menjalankan program kerja tersebut maka kepala desa bisa melakukan teguran secara langsung kepada aparatnya.

## KESIMPULAN

Proses Manajemen Pemerintahan Desa Mekkatta terbilang belum efektif, hal ini terlihat dari proses perencanaan hingga evaluasi yang dilakukan terhadap setiap program pemerintah desa. Kondisi ini diakibatkan oleh minimnya sumberdaya manusia dan minimnya dukungan dana bagi pembangunan desa. Sekalipun kemudian proses yang terjadi cukup demokratis dalam menghasilkan berbagai kesepakatan kolektif masyarakat desa, Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa Mekkatta belum sepenuhnya mampu menterjemahkan inovasi-inovasinya untuk pembangunan desa, karena suara kolektif masyarakat masih dipengaruhi oleh pola pikir pembangunan yang sifatnya fisik dan jangka pendek saja.

Perubahan Undang-Undang Desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 memang membawa angin segar bagi perubahan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengembangkan desa tersebut, namun pada konteks Masyarakat Desa Mekkatta hal ini masih akan menemui

sejumlah kendala teknis karena untuk bisa memajukan Desa Mekkatta, pemerintah desa perlu membina kapasitas masyarakatnya melalui pemberdayaan terlebih dahulu. Disamping itu dalam proses yang berjalan saat ini pemerintah desa memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk kelangsungan organisasi semata sehingga secara tidak langsung organisasi pemerintah desa tersebut lebih hanya menjadi lembaga yang focus pada proses administrasi semata. Hal yang paling penting dalam manajemen pemerintahan desa adalah kebijakan mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Sehingga inovasi pembangunan serta efektifitas dan efisensi pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anwar. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Perempuan : Perubahan Sosial Melalui Pemberdayaan Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan*, Bandung: Alfabeta.
- Eko, Sutoro. (2011). Modal Sosial, Desentralisasi, Demokrasi Lokal. *Draft makalah disajikan dalam Seminar Internasional IV "Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Demokrasi dan Partisipasi"*, yang digelar oleh Yayasan Percik dan The Ford Foundation, Salatiga, 15-18 Juli 2003.
- Kertonegoro, Sentanoe. (1985). *Prinsip dan Teknik Manajemen*. Yogyakarta: Ananda.
- Muluk, Khairul M.R. (2006). *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing dan Center Indonesia Reform.
- Purwosantoso. (2003). Pengembangan Modal Sosial dalam Rangka Pengembangan Otonomi Desa: Suatu Tantangan. *Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan*: 3 (1): 46-64.
- Siagian, P Sondang. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sufianti, Ely. (2014). Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif di dalam Masyarakat Non-Kolaboratif. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*: Vol 25 (1):78-96. diakses melalui <http://repository/itb.ac.id>.
- Syarifin & Jubaedah. (2005). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wasistiono, S & Tahir, Irwan. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, Fokusmedia-IKAPI.